

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian dan Esensi Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologis, berasal dari bahasa Inggris, yakni “*empowerment*” dari kata dasar “*power*” yang berarti kemampuan untuk bertindak, mencapai, tujuan, atau mewujudkan suatu hal. Dengan awalan “*em*” pemberdayaan (*empowerment*) dapat diartikan sebagai kekuatan yang ada dalam diri individu, yang menjadi sumber kreativitas.³² Sedangkan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” pemberdayaan diartikan sebagai upaya membangun potensi melalui dorongan, motivasi, dan peningkatan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki, serta mengembangkan potensi tersebut secara optimal.³³

Secara konseptual, pemberdayaan adalah proses dan usaha untuk memberikan atau memperoleh kekuatan, kemampuan, dan daya kepada individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan, agar mereka dapat mengenali, menganalisis, dan menentukan kebutuhan, potensi, serta masalah yang dihadapi. Selain itu, pemberdayaan juga memungkinkan mereka untuk memilih solusi yang tepat dengan memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.³⁴

³² Totok mardiknto Aprillia Theresia, Krisnha S, Andini, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm, 117.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). Hlm, 88.

³⁴ Bambang Weblog Nugroho, “Pemberdayaan Masyarakat: Hakikat,” My Wordpress Blog, 2023, <https://bambangwn.umi.ac.id/?p=103>. Diakses pda 12 September 2024.

Terry Wilson menyatakan bahwa konsep *community economic development* merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya lokal dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.³⁵ Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk memperkuat posisi kelompok rentan, tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat.

2. Pemberdayaan dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan dalam Islam, dikenal dengan istilah *tamkin*, yang berarti memberikan kekuatan dan memperkokoh seseorang dengan memberikan otoritas serta daya (baik emosional maupun material), agar mampu mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Kata *tamkin* dalam Al-Qur'an menekankan bahwa pemberdayaan manusia tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga dimensi spiritual.³⁶

Pemberdayaan dalam perspektif Islam berkaitan erat dengan prinsip *maqashid al-Syariah* (tujuan utama syariat Tuhan), yang mencakup lima kebutuhan dasar manusia, yakni menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*).³⁷ Dengan demikian, pemberdayaan dalam Islam bersifat holistik, tidak

³⁵ Terry Wilson, *The Empowerment Manual*, (Vernon: Grower Publishing Company, 1996). Hlm, 37. Dan lihat Starhawk, *The Empowerment Manual*, (Canada: New Society Publishing, 2011). Hlm, 8.

³⁶ Moch Taufik Yulizar D. Sanrego, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan) Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016). Hlm, 76.

³⁷ *Ibid.*, 77.

hanya memerdekakan secara ekonomi, tetapi juga mendorong pencapaian kesejahteraan spiritual dan sosial.

Pemaparan di atas, menyimpulkan bahwa pemberdayaan dalam perspektif Islam merupakan suatu proses penguatan yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual, dengan tujuan akhir membentuk manusia yang mandiri, bermartabat, dan berdaya guna dalam kehidupan dunia dan akhirat.

3. Urgensi Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah usaha untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan peran yang mereka alami dalam masyarakat. Secara etimologis, perempuan merujuk pada orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.³⁸ Pemberdayaan adalah usaha untuk memperkuat keberadaan individu, keluarga, komunitas, bangsa, pemerintahan, negara, dan tatanan global, dalam rangka merealisasi kemanusiaan yang adil dan bermartabat, yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan sosial.³⁹

Perempuan dalam istilah gender, sering digambarkan sebagai individu yang lembut, anggun, penuh kasih sayang, dan emosional.

Perempuan juga sering dipandang sebagai makhluk yang lebih

³⁸ Nuril Hidayati and Ashfa Fikriyah, "Perempuan Dan Politik; Antara Cita Dan Fakta Studi Atas Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Brunei Darussalam," *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 14, no. 1 (2016): 111–21, <https://doi.org/10.30762/realita.v14i1.238>. Hlm, 112.

³⁹ Rohimi, *Perempuan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Editor. Lalu Hedra Wijaya (Guepedia, 2020). https://www.google.co.id/books/edition/Perempuan_Dan_Pemberdayaan_Ekonomi_Masyarakat/Y9pmeaaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Buku+Pemberdayaan+Perempuan&printsec=frontcover. Hlm, 51.

emosional, pasif, lemah, dan kurang kompeten, kecuali dalam ranah domestik.⁴⁰

Sedangkan laki-laki sering dipandang sebagai sosok yang lebih kuat dan rasional sehingga mereka ditempatkan dalam sektor publik untuk mencari nafkah bagi keluarga. Pandangan-pandangan ini terinternalisasi dalam masyarakat sehingga membentuk konstruksi sosial yang menganggap perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai kodrat yang tidak dapat diubah.⁴¹ Akibatnya, perempuan sering dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan perlu ditingkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk menghapus stigma dan memperkuat posisi perempuan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lainnya, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan.⁴²

Langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam pemberdayaan perempuan meliputi pemberian dukungan yang memfokuskan perhatian pada perempuan, khususnya ibu-ibu, yang memerlukan peningkatan ketrampilan secara bertahap dan berkelanjutan, agar mereka dapat mengelola serta memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya. Secara praktis, hal ini dapat diwujudkan

⁴⁰ Muhamad Fachri Fasya, Lilis Karwati, and Wiwin Herwina, "Peran Gender Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan Di Kota Tasikmalaya," *Jendela PLS* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i2.5181>. Hlm,139.

⁴¹ Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan Dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman Kontemporer," *Jurnal Harkat :Media Komunikasi Gender* 6, no. 1 (2018). Hlm, 24.

⁴² Mariatul Khiftiyah, "Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1024>. Hlm, 5.

melalui pemberian pelatihan atau bimbingan usaha kecil, serta memberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi secara aktif.⁴³

Pemberdayaan perempuan, jika di lihat dari perkembangannya, telah menunjukkan peningkatan nyata dalam berbagai aspek. Salah satu contohnya adalah perbaikan kondisi dan kualitas hidup perempuan yang terlihat dalam sektor-sektor penting, seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan, ketika diberi ruang dan dukungan yang memadai, mampu mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam pembangunan keluarga serta masyarakat.

4. Hukum Pemberdayaan Perempuan

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang adil dengan menghormati nilai kemanusiaannya, menghapus ketidakadilan yang dialami sepanjang sejarah, dan memberikan jaminan atas hak-haknya.⁴⁴ Pada dasarnya, perempuan berperan dalam mendukung keluarga untuk mencapai kesejahteraan. Melalui pemberdayaan, perempuan berkontribusi membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dengan berlandaskan semangat kerja sama dan saling membantu dalam kebaikan.

Pemberdayaan perempuan dipandang krusial dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menjawab tantangan masa kini

⁴³ Ayu Widya Astuti et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Ganda Pada Perempuan Sebagai Wanita Karier Dalam Membantu Ekonomi Keluarga," *Journals Of Indonesian Multidisciplinary Research* 3 (2024). Hlm, 13.

⁴⁴ Alimni and Hamdani, "Peran Perempuan Dalam Dunia Pendidikan Pada Masa Rasulullah SAW," *Jurnal Hawa Asatudi Pengurus Utama Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2021). Hlm, 58.

yang membutuhkan pendekatan komprehensif untuk mendukung perempuan. Langkah ini bertujuan agar mereka dapat bangkit, memperoleh hak-haknya, dan tidak lagi menjadi kelompok yang termarginalkan dalam proses pembangunan. Seperti penjelasan dalam Al-Qur'an surat Ar-rad ayat 11 bahwa:⁴⁵

لَهُۥٓ مُعَقَّبَتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥٓ مِمَّنۢ أَمَرَ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُعَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۖ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًاۙ فَلَا مَرَدَّ لَهُۥٓ
وَمَا لَهُمْ مِّنۡ دُوْنِهٖۙ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya usaha dan kerja keras manusia dalam memperbaiki kondisi kehidupannya. Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka berupaya untuk mengubahnya sendiri. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu langkah nyata untuk mendorong kemajuan perekonomian.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 yang

⁴⁵ “Surat Ar-Ra’d Ayat 11 Arab Latin Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/ar-ra'd/11>. Diakses 23 Agustus 2024.

mengubah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015-2019. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong peningkatan kesetaraan gender, memperkuat perlindungan hak-hak perempuan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di Kemen PPPA, dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.⁴⁶

5. Proses Pemberdayaan

Proses adalah serangkaian tindakan atau kejadian yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, atau sebagai serangkaian perubahan alami yang terjadi.⁴⁷ Sementara itu, menurut Edi Suharto, menyatakan bahwa pemberdayaan memiliki dua dimensi, yaitu sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada rangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan atau kekuatan kelompok yang berada dalam posisi rentan, termasuk mereka yang terjebak dalam kondisi kemiskinan.

Sebagaimana dikutip dalam Mariatul Khiftiyah, Totok Mardikanto menyatakan bahwa proses pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan untuk ikut serta, memanfaatkan peluang, atau mengakses sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup, baik pada tingkat individu,

⁴⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 1 tahun 2015 tentang rencana strategis kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2015-2019 (Jakarta, 2019). Hlm, 103.

⁴⁷ Mariatul Khiftiyah, "Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19." Hlm, 5.

kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan nilai dan potensi individu atau kelompok yang diberdayakan. Proses ini terutama ditujukan untuk mendukung kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok marginal lainnya, agar mereka dapat mencapai kesejahteraan secara mandiri.⁴⁸

Terry Wilson dalam bukunya *“The Empowerment Manual”*, proses pemberdayaan lahir dari praktik di lapangan dengan tujuan yang sama, yaitu pengembangan usaha atau bisnis yang dimiliki individu dalam suatu organisasi. Pemberdayaan tidak terjadi secara instan, melainkan memerlukan waktu, usaha dari dalam diri, serta dukungan berupa sumber daya dan modal. Wilson menguraikan tahapan pemberdayaan sebagai berikut:⁴⁹

a) *Penyadaran (Awakening)*

Tahap awal dalam pemberdayaan adalah proses menyadarkan individu atau masyarakat akan kemampuan, sikap, dan keterampilan yang mereka miliki. Selain itu, dalam tahap ini juga dirancang harapan serta rencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan efektif.

b) *Pemahaman (Understanding)*

Pada tahap ini, individu atau masyarakat diberikan pemahaman serta perspektif baru terkait pemberdayaan.

⁴⁸ *Ibid.*, 6

⁴⁹ Terry Wilson, *The Empowerment Manual*, (Vernon: Grower Publishing Company, 1996). Hlm, 37. Dan lihat Starhawk, *The Empowerment Manual*, (Canada: Newe Society Publishing, 2011). Hlm, 8.

Mereka mulai memahami aspirasi, kondisi yang ada, serta tuntutan dari komunitas terhadap penerima manfaat, sehingga dapat menghargai proses pemberdayaan itu sendiri.

c) Pemanfaatan (*Harnessing*)

Tahap penyadaran dan pemahaman sudah terlewati, kemudian masyarakat mulai memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan komunitas. Tahap ini menjadi langkah konkret dalam menerapkan pemberdayaan di lingkungan mereka.

d) Penggunaan (*Using*)

Pada tahap akhir, individu atau kelompok mulai menerapkan keterampilan dan kemampuan yang telah diasah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi benar-benar terintegrasi dalam aktivitas mereka.

Langkah strategis dalam pemberdayaan perempuan adalah menjadikan perempuan sebagai pusat perhatian. Khususnya bagi kaum ibu, kemampuan mereka perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pelatihan atau praktik usaha skala kecil. Melalui langkah ini, diharapkan mereka mampu memanfaatkan peluang yang tersedia di lingkungan sekitar.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, pemberdayaan masyarakat berbeda dengan sekadar pemberian

santunan. Pemberdayaan adalah proses pembinaan yang berkelanjutan, yang bertujuan agar masyarakat mampu menikmati hasil dari usaha mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan ajaran Allah SWT yang menganjurkan umat-Nya untuk berusaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu, proses pemberdayaan harus fokus pada peningkatan kapasitas dan motivasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada.

B. Hakikat dan Peran Ekonomi Kreatif

1. Definisi Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif dapat dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, dengan kemampuan untuk menciptakan nilai ekonomi melalui produksi dan pemanfaatan barang serta jasa yang berfokus pada aspek intelektual. Ekonomi ini memanfaatkan ide-ide kreatif sebagai aset utama yang menghasilkan nilai tambah dan inovasi. Sektor-sektor dalam ekonomi kreatif mencakup bidang yang berorientasi pada penciptaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.⁵⁰

Sebagaimana dikutip dalam buku karya Ari Riswanto, Hesmondhalgh menjelaskan ekonomi kreatif sebagai serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan produksi budaya dan simbolik, yang

⁵⁰ Ari Riswanto dkk., *Ekonomi Kreatif (Inovasi, Peluang, Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm, 7.

memiliki potensi untuk menciptakan ekonomi bernilai tinggi.⁵¹ Fokus utama dari ekonomi kreatif adalah pemanfaatan kreativitas dan inovasi yang didorong oleh kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, industri tidak lagi dapat bersaing di pasar global hanya dengan mengandalkan harga atau kualitas produk semata, tetapi harus dapat bersaing dalam hal inovasi, kreativitas, dan imajinasi.

Ekonomi kreatif mulai populer setelah John Howkins menerbitkan bukunya yang berjudul *"The Creative Economy, How People Make Money from Ideas"*. Howkins mendefinisikan industri kreatif sebagai kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada ide sebagai input dan output. Itulah inti dari kreativitas. Dalam kata lain, esensi dari kreativitas adalah gagasan. Dengan demikian, hanya berbekal gagasan, orang-orang kreatif bisa menghasilkan penghasilan yang sangat besar.⁵²

⁵¹ Ari Riswanto, *Buku Ajar Ekonomi Kreatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm, 7.

⁵² Siti Maryam, Emi Salmah, and Muhammad Irwan, "Penyuluhan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Bagi Pemuda Di Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Abdimas Sangkabira* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v2i2.208>. Hlm, 296.

2. Peran Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan, antara lain:⁵³

- a) Menciptakan lapangan kerja, terutama karena sebagian besar sektor ekonomi kreatif terdiri dari UMKM. Karakteristik utama dari kelompok usaha ini adalah bersifat padat karya, yang berarti lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan perusahaan padat modal.
- b) Mendorong pengembangan kewirausahaan, karena ekonomi kreatif menekankan pada kreativitas dan inovasi individu. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh banyaknya unit usaha di sektor ini, yang masing-masing menghasilkan produk, akan turut berkontribusi pada pembentukan atau perubahan produksi nasional.
- c) Mendorong pengembangan berbagai sektor, karena kegiatan ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor perekonomian. Pertumbuhan sektor ini akan berdampak positif pada sektor-sektor terkait seperti sektor pariwisata yang sangat membutuhkan subsektor seperti gastronomi, kerajinan, pasar seni, dan seni pertunjukan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kreatif juga mendukung perkembangan industri manufaktur secara umum.
- d) Mendorong pembangunan daerah, karena mayoritas usaha di sektor ekonomi kreatif merupakan UMKM yang berlokasi di daerah. Kawasan ini dapat mengandalkan kegiatan ekonomi kreatif yang

⁵³ Tulus T.H. Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2019). Hal, 123-124.

digerakkan oleh generasi muda sebagai pendorong utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang dapat mengurangi atau menghilangkan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta mencapai pemerataan ekonomi.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Kesejahteraan Keluarga

1. Definisi dan Urgensi Kesejahteraan Keluarga

Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai kondisi yang aman, sentosa, dan makmur.⁵⁵ Secara lebih luas, kesejahteraan merupakan suatu tatanan kehidupan yang mencakup pemenuhan aspek material dan spiritual, disertai dengan rasa aman, bermartabat, dan tenteram, baik secara individu, dalam lingkungan rumah tangga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan memungkinkan setiap warga negara menjalani kehidupan yang layak dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.⁵⁶

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, terdiri dari satu atau lebih individu yang terikat melalui hubungan perkawinan, kelahiran, adopsi, atau kekerabatan lainnya.⁵⁷ Dalam konteks ini, kesejahteraan keluarga menjadi indikator penting dalam melihat kualitas kehidupan sosial di tingkat dasar.

⁵⁴ *Ibid.*, 124.

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hlm, 270.

⁵⁶ Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004). Hlm, 99.

⁵⁷ T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999). Hlm, 233.

Soetjipto berpendapat bahwa kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga. Sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud.⁵⁸

Pendapat selaras juga disampaikan oleh Mongid, yang menyatakan kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan fisik-materil, mental-spiritual, dan sosial keluarga. Kondisi ini memungkinkan keluarga hidup secara wajar sesuai dengan lingkungannya, serta memberikan ruang yang optimal bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, dan membentuk kepribadian yang matang sebagai calon sumber daya manusia yang berkualitas.⁵⁹

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi ideal yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga secara menyeluruh baik secara fisik, psikologis, spiritual, maupun sosial dalam suasana rumah tangga yang harmonis dan mendukung. Kesejahteraan ini memungkinkan keluarga menjalani kehidupan yang layak, mengatasi tantangan secara kolektif, serta menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang sehat dan produktif bagi generasi penerus.

⁵⁸ Soetjipto, *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* (Semarang: Satya Wacana Press, 1992). Hlm, 34.

⁵⁹ A. mongid, *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Jakarta: BKKBN, 1995). Hlm, 10.

2. Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif Islam

Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai definisi kesejahteraan. Sebagaimana dikutip dalam Wahyu Nasikhatul Khasanah, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan dalam perspektif Islam memiliki dua cakupan utama, yakni:⁶⁰

- a. Kesejahteraan dalam Islam mencakup aspek yang holistik dan seimbang, yaitu terpenuhinya kebutuhan materi sekaligus kebutuhan spiritual secara proporsional. Konsep ini menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk terdiri dari unsur fisik dan jiwa, sehingga kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara keduanya. Selain itu, manusia memiliki dimensi individual dan sosial, sehingga kesejahteraan juga menuntut harmoni antara kepentingan pribadi dan lingkungan sosial.
- b. Kesejahteraan juga mencakup dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak terbatas pada dunia semata, melainkan berlanjut ke alam akhirat yang bersifat kekal. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan materi di dunia sebaiknya diarahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka kesejahteraan akhirat harus menjadi prioritas utama karena nilai dan keberlangsungannya yang lebih abadi dibandingkan kehidupan dunia yang bersifat sementara.

⁶⁰ Wahyu Nasikhatul Khasanah, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam: Implementasi BLT Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 2 (2023): 192–97, <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1400>. Hlm, 195.

Pemaparan di atas, menyimpulkan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga mencakup kebutuhan spiritual. Islam menekankan pentingnya pencapaian kebahagiaan (kesejahteraan) yang holistik, meliputi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Namun demikian, sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan, manusia kerap mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan pemenuhan berbagai kebutuhan dan keinginan duniawi. Hal ini menyebabkan pencapaian kesejahteraan lahir dan batin menjadi tidak mudah untuk direalisasikan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk senantiasa mengikuti petunjuk Allah SWT, baik dalam menjalankan ibadah, maupun dalam interaksi sosial, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki menurut ajaran Islam.

Islam memaknai kehidupan yang mulia dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai *falah*. Kondisi ini dapat diwujudkan apabila seluruh kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, akan membawa manusia pada kondisi ideal yang mengangkat derajatnya sebagai makhluk yang paling mulia, yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *mashlahah*.⁶¹

⁶¹ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam(Yogyakarta), *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm, 4-5.

Penjelasan diatas, memaknai kesejahteraan baik melalui pandangan umum dan perspektif Islam memiliki kesamaan sebagai keadaan terpenuhinya berbagai kebutuhan, termasuk aspek material, moral, sosial, dan spiritual. Namun dalam perspektif Islam, memiliki konsep kesejahteraan yang lebih menyeluruh. Tujuan akhir dari kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia, melainkan juga mencakup kehidupan akhirat.

3. Indikator Kesejahteraan Keluarga

Indikator kesejahteraan keluarga yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi keluarga. Indikator kesejahteraan keluarga pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan diri dan keluarga.⁶² Dengan mengacu pada indikator yang valid, sederhana, dan mudah diterapkan, khususnya di pedesaan, dapat diidentifikasi posisi atau tingkat capaian keluarga dalam hal kesejahteraan, tidak hanya secara material, tetapi juga dalam hal partisipasi kreatif dan pembangunan potensi diri..

Hal ini menjadi penting karena kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari aspek finansial semata, tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam mengembangkan kreativitas, menjalin relasi sosial, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan dan

⁶²Kesejahteraan Keluarga,” Portal Hukum dan Peraturan Indonesia, n.d., [https://paralegal.id/pengertian/kesejahteraan-keluarga/#:~:text=Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga,mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga](https://paralegal.id/pengertian/kesejahteraan-keluarga/#:~:text=Kesejahteraan%20Keluarga%20adalah%20kondisi%20keluarga,mengukur%20kepuasan%20pemenuhan%20kebutuhan%20keluarga). Diakses pada 24 Mei 2025.

kemandirian.⁶³ Pemahaman terhadap posisi ini akan mempermudah dalam merumuskan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh, terutama melalui pendekatan ekonomi kreatif.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan sejumlah indikator ekonomi keluarga sebagai panduan untuk menilai kesejahteraan keluarga secara menyeluruh antara lain:⁶⁴

a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari lima kebutuhan dasar yang diperlukan untuk membangun keluarga sejahtera disebut keluarga pra-sejahtera. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pendidikan agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal dikategorikan sebagai keluarga sejahtera tahap I. Beberapa ciri keluarga sejahtera tahap I antara lain:

- 1) Setiap anggota keluarga beribadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 2) Umumnya, seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

⁶³ Widy Dwi Risma, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis," *E-Journal Inskripsi* 1, no. 1 (2021), Hlm, 601.

⁶⁴ *Ibid.*, 50

- 3) Setiap anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan perjalanan.
- 4) Bagian terbesar dari lantai rumah sudah bukan lagi tanah.
- 5) Jika anak sakit atau pasangan usia subur ingin menggunakan alat kontrasepsi, mereka dibawa ke fasilitas kesehatan atau petugas medis.

c. Keluarga Sejahtera tahap II

Keluarga yang telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I dan juga memenuhi syarat sosial dan psikologis, dikategorikan sebagai keluarga sejahtera tahap II, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara rutin.
- 2) Keluarga menyajikan daging, ikan, telur atau lauk lainnya minimal seminggu sekali.
- 3) Setiap anggota keluarga mendapat minimal satu pasang pakaian baru dalam setahun.
- 4) Luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni rumah.
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat setiap tiga bulan sekali.
- 6) Setidaknya satu anggota keluarga dewasa mempunyai penghasilan tetap.
- 7) Semua anggota keluarga yang berusia antara 10-60 tahun dapat membaca bahasa latin.

- 8) Jika mempunyai dua anak atau lebih, keluarga dengan calon pasangan menggunakan alat kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga yang memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap II dan juga memenuhi syarat untuk pengembangan keluarga sejahtera tahap II, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berusaha meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian pendapatan keluarga dapat dicadangkan untuk tabungan keluarga.
- 3) Keluarga makan bersama minimal satu kali sehari dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- 4) Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Menghabiskan waktu bersama di luar rumah minimal enam bulan sekali.
- 6) Dapat memperoleh informasi dari surat kabar, televisi atau majalah.
- 7) Anggota keluarga dapat menggunakan pilihan transportasi yang sesuai dengan kondisi setempat.

5) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga yang dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap III dan juga memenuhi kriteria pengembangan keluarga sejahtera, antara lain: ⁶⁵

- 1) Memberikan sumbangan keuangan secara sukarela pada kegiatan sosial masyarakat secara berkala atau pada waktu-waktu tertentu.
- 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga berperan sebagai pengurus di suatu masyarakat, yayasan, atau lembaga sosial.

Penjabaran konsep kesejahteraan keluarga oleh BKKBN menunjukkan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dinamis yang dicapai melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pada peningkatan kualitas sosial dan partisipasi dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kapasitas adaptif keluarga terhadap perubahan. Dengan struktur konseptual yang komprehensif dan terukur, teori BKKBN dapat dijadikan landasan analitis yang valid untuk mengkaji keberhasilan program-program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh dan berkelanjutan.

⁶⁵ *Ibid.*, 54.